

# **POLITIK DAUD BEUREUEH DALAM GERAKAN DI/TII ACEH**

Oleh:

**Azis Muhajir**

**(Mahasiswa Program Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh)**

*email: ajir.adam@gmail.com*

## *Abstrak*

Melalui pendekatan sejarah, artikel ini akan memaparkan politik Daud Bereu-eh dalam gerakan DI/TII di Aceh. Aceh yang memiliki kandungan sejarah tak bisa dipungkiri telah mewarnai keadaan politik di Indonesia. Dimulai pra kemerdekaan RI sampai sekarang terus menampakkan diri. Berbicara sejarah Aceh pasti melibatkan pembicaraan tentang ulama. Seperti tulang yang terbungkus dengan daging, jikapun dipisahkan maka ia tidak akan berarti apa-apa lagi. Terutama ulama sekaliber Daud Beureu-eh, sebagai tongkat estafet ulama sebelum dan sesudahnya, yang mempengaruhi politik Aceh dan Indonesia hingga kini. Daud Bereu-eh yang mempelopori bangkitnya DI/TII di Aceh (1953-1959), adalah titik awal berdirinya Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Tapi kalau dilihat dari karakter perpolitikan masing-masing perjuangan ini terdapat perbedaan yang signifikan. Gerakan DI/TII disebut sebagai perjuangan yang berideologikan agama, sedangkan gerakan GAM yang cenderung “sekuler”. Tak dapat ditampik pula gerakan DI/TII mendapat perlawanan dari ulama Aceh sendiri.

**Kata Kunci:** politik Daud Bereu-eh, DI/ TII Aceh

## **A. Pendahuluan**

Dalam lintas sejarah Aceh, ulama memegang peran penting dalam mengayomi dan merespon berbagai persoalan masyarakat, tidak hanya dalam bidang akidah, ibadah, muamalah, bahkan dalam bidang sosial keagamaan, pendidikan, ekonomi, dan politik, sekalipun untuk menuju masyarakat yang makmur dan mandiri. Karena itu tidak sedikit ulama yang memimpin perjuangan melawan kaum kolonial di Aceh, Mereka menjadikan dayah yang dipimpinya sebagai tempat untuk basis perlawanan terhadap kaum penjajah, seperti Belanda, Jepang dan lain-lain.

Ulama merupakan kelompok yang telah lama dikenal dan menyatu dengan masyarakat Aceh karena karya-karya mereka yang monumental dan memiliki reputasi internasional, selain itu juga ulama sudah banyak berkiprah mulai dari zaman kesultanan Aceh sampai mereka terlibat langsung dalam perjuangan melawan kolonialisme dan imperialisme Barat di seluruh Nusantara khususnya di Aceh.<sup>1</sup>

Dalam masyarakat dikenal beberapa kelompok ulama yang tergabung dalam sejumlah organisasi keulamaan seperti NU (Nahdhatul Ulama), ulama Muhammadiyah, dan ulama dayah. Bahkan di Aceh terdapat organisasi khusus Ulama yang dibentuk melalui otonomi Aceh seperti Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA), Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA), Musyawarah Ulama Nanggroe Aceh (MUNA), dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU).

Namun secara sosiologis, terdapat dua kelompok ulama yang berkembang dalam masyarakat Aceh, yaitu ulama dayah dan ulama non-dayah. Ulama dayah sering diartikan

---

<sup>1</sup>M. Hasbi Amiruddin. *Menatap Masa Depan Dayah di Aceh*, (Banda Aceh : Yayasan PeNA, 2008), hal. 38

dengan sekelompok ilmuan/cendekiawan yang berlatar belakang pendidikan dayah dan menetap di dayah tidak melanjutkan pendidikan formal di perguruan tinggi, sedangkan ulama non-dayah sering dimaknai dengan sekelompok ilmuan/cendekiawan yang berlatar belakang pendidikan formal atau sering disebut alumni dayah yang telah menempuh pendidikan formal di Perguruan Tinggi. Ulama ini lebih dikenal dengan sebutan ulama modern dengan pola pikir yang lebih moderat. Kiprah ulama ini di kenal setelah Indonesia merdeka, mereka juga banyak yang mengabdikan ilmunya di lembaga-lembaga pendidikan formal, seperti di Perguruan Tinggi Islam dan lembaga-lembaga pemerintahan.

Bila kita melihat secara seksama, sesuai dengan fungsinya kita akan menemukan bahwa ulama di Aceh pada umumnya telah berusaha untuk mengatasi konflik-konflik yang pernah muncul di Aceh. Dalam sejarah Islam di Aceh juga memperlihatkan ulama selalu menjadi peleraai konflik-konflik yang pernah terjadi.<sup>2</sup>

Mungkin konflik yang paling berat dirasakan di Aceh adalah konflik internal sesama satu bangsa, bahkan satu agama, seperti yang terjadi pada tahun 1953-1959 yaitu peristiwa pemberontakan DI/TII. Hal yang hampir sama juga yang terjadi pemberontakan pada tahun 1976-2005 yang awal munculnya digelar dengan Aceh Merdeka (AM), terakhir berubah menjadi Gerakan Aceh Merdeka.

## **B. Politik Daud Beureu-eh dalam Gerakan DI/TII Aceh**

### **1. Kronologis Munculnya Gerakan DI/TII di Aceh**

Peristiwa terjadinya pemberontakan DI/TII tentu ada sebab-sebab tertentu sehingga bisa muncul pemberontakan DI/TII di Aceh yang dipelopori oleh Tgk. Muhammad Daud Beureu-eh. Salah satunya adalah karena ketidakpuasan rakyat Aceh terhadap pemerintah pusat. Menurut salah seorang pelaku sejarah yaitu Tgk. M. Nur El Ibrahimy mengemukakan bahwa peristiwa yang menjadi poblema nasional tersebut terjadi erat kaitannya dengan dan karena kecenderungan pusat (Jakarta) yang munafik dan para petinggi republik telah mengecewakan tokoh-tokoh ulama di Aceh.<sup>3</sup>

Pemberontakan tersebut mengakibatkan terjadinya kongres alim ulama se-Indonesia yang berlangsung di Medan pada bulan April 1953, di mana Tgk. Muhammad Daud Beureu-eh memegang pucuk pimpinan selaku ketua umumnya diantara lain dengan suara bulat dan sepakat telah mengambil keputusan “Memperjuangkan dalam pemilihan umum yang akan datang supaya negara RI ini menjadi Negara Islam Indonesia.”

Para alim ulama dan cerdik pandai yang hadir dalam kongres di waktu itu telah berjanji dengan dirinya sendiri dan dengan Allah secara *bai'ah* (bersumpah) betapun susah dan sukarnya pasti segenap keputusan yang telah diambilnya itu akan dilaksanakannya.<sup>4</sup>

Pada tanggal 21 September 1953 merupakan sebuah peristiwa yang tidak bisa di lupakan oleh masyarakat Aceh. Dimana pada tanggal tersebut meletusnya suatu peristiwa berdarah di Tanah Rencong yang bagi rakyat Aceh ini merupakan sebuah tragedi besar bagi negeri Aceh. Pemerintah pada waktu itu di pipimpin oleh Perdana Menteri Ali

---

<sup>2</sup>M. Hasbi Amiruddin, *Menatap Masa Depan ...*, hal. 111

<sup>3</sup>Misri A. Muchsin, *Potret Aceh Dalam Bingkai Sejarah*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007), hal. 86

<sup>4</sup>Misri A. Muchsin, *Potret Aceh Dalam ...*, hal. 118

Sastroamidjojo, peristiwa ini lebih di kenal dengan Peristiwa Daud Beure-eh atau sering dinamakan dengan Pemberontakan Daud Beureu-eh. Namun kebanyakan rakyat Aceh menyebut peristiwa ini adalah peristiwa berdarah. Pada tanggal tersebut Tgk. M. Daud Bereu-eh yang merupakan mantan Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo dan merupakan mantan Gubernur Aceh yang pertama mengangkat senjata terhadap Pemerintah Pusat dan memproklamasikan Aceh sebagai negara Islam.<sup>5</sup>

Sebelum peristiwa berdarah terjadi yaitu pada bulan Mei 1953 Tgk. M. Daud Bereu-eh masih memimpin kongres ulama di Medan, di mana di dalam kongres tersebut diambil beberapa keputusan diantaranya “mengadakan kerja sama yang erat dengan instansi-instansi pemerintah dan organisasi-organisasi untuk amar makruf dan nahi munkar”. Yang mana hasil keputusan tersebut diakui oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo yang kemudian di untkapkan dalam rapat paripurna terbuka DPR-RI pada tanggal 28 Oktober 1953.<sup>6</sup>

Ketika para pejuang Aceh sedang di liputi rasa bangga dan patriotisme di pertengahan tahun 1950 datanglah kabar bahwa Devisi X akan di bubarkan dimana di Aceh akan hanya ada satu brigade yang tunduk dibawah Devisi Bukit Barisan di Medan. Tidak hanya itu di sela-sela keresahan karena Devisi X akan di bubarkan datang pula kabar Provinsi Otonomi Aceh akan di bubarkan pula, seluruh Kabupaten di Aceh akan tunduk kepada Provinsi Sumatra Utara.

Karena mendengar kabar akan di bubarnya Devisi X dan Provinsi Aceh, timbullah rasa keresahan dari rakyat Aceh terutama yang terlibat dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda bukan saja rasa keresahan yang timbul bahkan ketegangan yang di alami rakyat Aceh. Inilah balas jasa terhadap Aceh yang telah banyak membantu Indonesia dan membiayai wakil-wakil Pemerintah Pusat dan bahkan membeli dua buah pesawat terbang pertama untuk Indonesia.

Keputusan ini sangat mengecewakan masyarakat Aceh karena sebelum tahun 1948 Soekarno berjanji kepada Daud Beureu-eh dan pemuka-pemuka masyarakat di Banda Aceh bahwa Aceh akan mendapatkan otonomi khusus. Itulah sebabnya keputusan Dewan Menteri mendapat kecaman keras hingga konflik telah kembali berlanjut. Daud Beureu-eh merasa Jakarta telah mengkhianati perjuangan Aceh.

Kebencian rakyat Aceh kepada Soekarno semakin menyala-nyala yang disulut pada 21 September 1953. Daud Beureu-eh memukul gong pemberontakan dengan pernyataan Aceh memisahkan diri dari Indonesia. Pernyataan ini terjadi setelah kongres ulama di Titeue Pidie. Dia mengumumkan Aceh menjadi bagian Dari Negara Islam Indonesia mengikuti Kartosoewirjo di Jawa Barat.

Sebenarnya ada satu kunci utama yang menyebabkan terjadinya pemberontakan DI/TII di Aceh ialah karena Aceh merasa dikhianati. Persoalan inilah yang menyebabkan kekecewaan dari pihak pemimpin dan rakyat Aceh. Karena Aceh lah sebagai daerah modal tegaknya NKRI ini. Aceh telah banyak berjasa atas kemerdekaan negara Indonesia tetapi setelah Indonesia merdeka Aceh merasa dirugikan. Sampai-sampai Aceh digabungkan dengan provinsi Sumatra Utara. Kekecewaan inilah yang menyebabkan lahirnya DI/TII di Aceh.

---

<sup>5</sup> M. Nur El Ibrahimy, *Peranan Tgk. M. Daud Bereu-eh dalam Pergolakan Aceh*, (Jakarta : Media Da'wah, 2001), hal. 1

<sup>6</sup> M. Nur El Ibrahimy, *Peranan Tgk. M. Daud Bereu-eh ...*, hal. 21

Ketika terjadinya penggabungan provinsi Aceh ke dalam provinsi Sumatra Utara menimbulkan kekecewaan terhadap pemimpi dan rakyat Aceh. sehingga rakyat Aceh menolak penggabungan tersebut. Penolakan itu terutama di sebabkan oleh: *pertama*, pembubaran provinsi Aceh itu menyebabkan rakyat dan pemimpin Aceh menganggap bahwa perintah pusat tidak tahu berterima kasih kepada jasa dan pengorbanan rakyat Aceh sampai dengan membeli dua pesawat terbang untuk perjuangan yang di akui sangat besar bahkan di akui sebagai daerah modal dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang karena itu diberi imbalan jasa pembentukan provinsi Aceh. Tetapi, setelah merdeka dan senang, Aceh tidak di pandang penting lagi dan provinsi Aceh dibubarkan. *Kedua*, cita-cita pemimpin dan rakyat Aceh untuk menjalankan syri'at Islam diseluruh Aceh secara khusus tidak akan mungkin diteruskan lagi. Ketidak puasan rakyat dan pemimpin Aceh terhadap keputusan pemerintah pusat itu berakhir dengan pemberontakan Aceh terhadap perintah pusat dengan memproklamasikan Aceh menjadi bagian dari Negara Islam Indonesia (NII) yang dipimpin oleh S.M. kartosuwiryo pada tanggal 23 September 1953. Naskah proklamasi itu ditanda tangani, atas nama rakyat Aceh yakni oleh Teungku Muhammad Daud Beureu-eh. Situasi Aceh setelah proklamasi itu, menjadi panas dan tegang.

Memang kondisi politik antara daerah Aceh dengan pusat tidak stabil. Berbagai kebijakan politik yang diciptakan oleh pemerintahan pusat menyebabkan keguncangan-keguncangan di beberapa daerah di tanah air Indonesia, termasuk Aceh sendiri. Rasa kecewa rakyat Aceh karena merasa tidak dihargai atas apa yang telah dikorbankan demi kemerdekaan negara Indonesia yang meyebabkan terjadinya pergerakan pada tahun 1953 yaitu peristiwa DI/TII. Para pengamat politik mengakui bahwa tahun-tahun awal kemerdekaan Indonesia, Aceh adalah daerah modal. Jadi gerakan DI/TII dianggap unik. Daerah Aceh hingga 1 Januari 1950 menjadi provinsi yang mempunyai status otonom, namun status ini hanya bertahan kurang dari satu tahun. Hal ini disebabkan pemberian kekuasaan kepada Sjarifuddin Prawiranegara.

Deliar Noer juga menyebutkan bahwa munculnya gerakan pemberontakan yang dimotori oleh Tgk. M. Daud Beureu-eh, karena pemerintahan pusat tidak memperhatikan kepentingan daerah. Pemberontakan tersebut semula memang dianggap ganjil, sebab tokoh penggeraknya yang terkenal sebagai ulama karismatik juga sebagai pejabat negara (Gubernur Militer Aceh, Tapanuli dan Tanah Karo). Akan tetapi mengapa memilih memberontak dari pada bekerja sama dengan pemerintah pusat, terutama dalam mengatasi ketimpangan berbagai hal antar pusat dan daerah.

Pendapat lain yaitu pendapat sisa-sisa feodal mereka mengatakan bahwa yang menyebabkan pemberontakan Daud Beureu-eh adalah kegelisan dan ketakutan akan ditangkapnya lebih dari 300 orang dari pemimpin-pemimpin PUSA yang yang telah banyak berbuat kesalahan baik selama peristiwa Cumbok maupun sesudahnya.<sup>7</sup>

Selain itu, pemberontakan Daud Beureu-eh juga di karenakan penangkapan tokoh-tokoh Aceh yang pada saat itu tidak lagi memiliki senjata karena sudah dikembalikan kepada pemerintah pada saat itu yang di instruksikan oleh Menteri Dr. Sukiman agar seluruh senjata yang masih ada pada tangan rakyat di seluruh Indonesia agar dikembalikan, karena melawan Belanda sudah selesai.

Kesempatan itu ternyata di mamfaatkan oleh Nazir yang merupakan kaum komunis dan sisa feodal yang sangat membenci para ulama, mereka bersatu untuk melumpukkan ulama keduanya bantu membantu dalam menangkap tokoh perjuangan kemudian di

---

<sup>7</sup>M. Nur El Ibrahimy, *Peranan Tgk. M. Daud Bereu-eh ...*, hal. 23

ceboskan dalam penjara dengan alasan menyimpan senjata gelap. Tindakan Nazir ini di karenakan rasa dendamnya terhadap Tgk. Beureu-eh yang menjabat sebagai Gubernur Militer dulu yang menghukumnya karena sering melanggar perintah Komandan Devisi.<sup>8</sup>

Lepas dari pada itu, ada dua pendapat yang mengatakan penyebab munculnya peristiwa berdarah 21 September 1953. *Pertama*, Tgk. M. Daud Beureu-eh terpaksa bertindak cepat dengan persiapan yang belum matang karena merasa didesak oleh keadaan sehingga tidak dapat menagguhkan waktunya lebih lama lagi. *Kedua*, peristiwa berdarah itu adalah permainan siasat atau jebakan dari lawan politiknya yang ingin menjerumuskannya kedalam bencana yang fatal dengan tujuan melenyapkannya dari arena politik dan menghancurkan gerakannya yang bertujuan memperjuangkan terlaksananya ajaran Islam di Serambi Mekah.<sup>9</sup>

## 2. Tujuan Gerakan DI/TII di Aceh

Gerakan ini bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara teokrasi dengan agama Islam sebagai dasar negara. Dalam proklamasinya bahwa “Hukum yang berlaku dalam Negara Islam Indonesia adalah Hukum Islam”, lebih jelas lagi dalam undang-undangnya dinyatakan bahwa “Negara berdasarkan Islam” dan “Hukum yang tertinggi adalah al-Quran dan Hadits”. Proklamasi Negara Islam Indonesia dengan tegas menyatakan kewajiban negara untuk memproduksi undang-undang yang berlandaskan syari’at Islam, dan penolakan yang keras terhadap ideologi selain al-Qur’an dan Hadits Shahih.

Gerakan ini juga bertujuan untuk memprotes kepada pemerintah pusat yang tidak mau melakukan provinsi Aceh seperti apa yang di harapkan oleh rakyat Aceh dimana sebagai daerah yang sudah lama terlibat dalam perang untuk mempertahankan Indonesia dari belanda, maka rakyat Aceh meminta pemerintah pusat untuk memperlakukan daerah Aceh dengan istimewa dalam hal budaya, agama, dan pendidikan.<sup>10</sup>

Sebagai akibat dari pemberontakan DI/TII dalam masa lampau, ideologi Pancasila telah pernah dinyatakan sebagai sesuatu yang "haram", karenanya tanpa pembinaan yang kontinyu atas dasar suatu konsepsi, maka rakyat dapat menjurus kepada pola berpikir yang keluar dari pola Pancasila, yang berarti kurang mantapnya Ketahanan Nasional. Walaupun ideologi Pancasila, sebagai akibat dari pemberontakan DI/TII telah pernah dinyatakan sebagai sesuatu yang "haram", namun demikian masyarakat pada umumnya telah meyakini kembali akan fundamentalnya Pancasila.

DI/TII memang memiliki ideologi tersendiri dalam negara Indonesia, mereka *muak* dengan ideologi Pancasila yang tidak menjamin keadilan dan kesejahteraan dalam bermasyarakat. Hal ini terungkap dari ungkapan DI/TII yang berbunyi: “Kami telah jemu melihat perkembangan-perkembangan atas dasar Negara Republik Indonesia, betapa tidak, sejak dari dahulu kami berharap, bercita-cita negara berkisar atas dasar Islam, akan tetapi jangankan terwujud apa yang kami idam-idamkan, malahan sebaliknya semakin hari-semakin tampak pada kami ada di antara pemuka-pemuka Indonesia mencoba membelot kearah yang sesat...”. Andaikan Undang-undang Dasar RI sudah memberi jaminan kemerdekaan beragama-Islam, sudah lama pula dapat berjalan hukum-hukum agama ditanah Aceh, yang rakyatnya 100 persen beragama Islam”. ... malah oleh Kejaksaan Agung sendiri pernah mencoba mengeluarkan larangan berkhotbah di mesjid

---

<sup>8</sup>Hasan Saleh, *Mengapa Aceh Begolak*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1992), hal. 137

<sup>9</sup>M. Nur El Ibrahimy, *Peranan Tgk. M. Daud Bereu-eh ...*, hal. 27

<sup>10</sup>M. Hasbi Amiruddin, *Ulama Dayah Pengawal Agama Masyarakat Aceh*, (Lhokseumawe : Yayasan Nadia, cet. 2, 2007), hal. 39

atau di tempat-tempat lain yang katanya tempat agama, yang berisi politik, padahal bagi kami politik ialah sebagian dari agama yang kami anut...<sup>11</sup>

### 3. Konflik Internal DI/TII

Pada suatu tengah malam kira-kira 4 hari menjelang hari raya Idul Adha 1373 H (1953), berlangsunglah suatu rapat rahasia di rumah Tgk. M. Daud Beureueh di Beureunun, Aceh Pidie, yang dihadiri oleh utusan-utusan seluruh Aceh sebanyak kira-kira 100 orang. Dalam pertemuan tersebut diperbincangkan cara-cara untuk melakukan *coup* di Aceh dan penyusunan barisan-barisan bersenjata. Untuk seluruh Aceh akan dibentuk 1 territorium dengan (bekas Kolonel) Husen Yusuf selaku komandannya, dan dibagi dalam resimen, sedang Tgk. A. Husin al-Mudjahid memangku jabatan panglima. Tgk. M. Daud Beureueh sendiri disamping menjadi imam Negara Islam Indonesia, juga mengawasi Tentara Islam Indonesia seluruh Aceh.<sup>12</sup>

Pada 21 September 1953 di Aceh meletus suatu peristiwa berdarah yang merupakan suatu tragedi bagi rakyat Tanah Rencong. Oleh pemerintah yang pada waktu itu dipimpin oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo, peristiwa ini dinamakan Peristiwa Daud Beureueh atau pemberontakan Daud Beureueh. Sedangkan rakyat Aceh menyebut peristiwa itu sebagai peristiwa berdarah. Pada tanggal tersebut itu, Tgk M. Daud Beureueh, seorang ulama besar, seorang pemimpin rakyat, bekas Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo dan bekas Gubernur Aceh yang pertama, mengangkat senjata terhadap pemerintah pusat dan memproklamasikan Aceh sebagai Negara Islam.<sup>13</sup>

Sejalan dengan saat meletusnya pemberontakan ini, disebarkanlah sebuah proklamasi tentang berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) di daerah Aceh yang ditandatangani oleh Tgk. M. Daud Beureueh dan berbunyi:

#### **PROKLAMASI**

*Berdasarkan pernyataan berdirinya Negara Republik Islam Indonesia pada tanggal 12 Syawal 1368/7 Agustus 1949 oleh Imam Kartosuwirjo atas nama umat Islam bangsa Indonesia, maka dengan ini kami menyatakan daerah Aceh dan sekitarnya menjadi bagian dari negara Islam Indonesia.*

*Atas nama Umat Islam Daerah Aceh dan Sekitarnya,*

*(tanda-tangan)*

*Teungku M. Daud Beureueh.*

*Tertanggal:*

*Aceh Darussalam,*

*13 Muharram 1373*

*21 September 1953*

---

<sup>11</sup> Herbert Feth & Lance Castles (ed), *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, (Jakarta: LP3ES, cet.2, 1995), hal. 209

<sup>12</sup> Ali Basyah Talsya, *Sejarah dan Dokumen-dokumen Pemberontakan di Aceh*, (Jakarta: Kusuma, n.d) hal. 64

<sup>13</sup> M. Nur El Ibrahimy, *Peranan Tgk. M. Daud Beureueh dalam Pergolakan Aceh*, (Jakarta: Media Dakwah, 2001) hal. 1

Disamping proklamasi itu, dikeluarkan pula suatu maklumat yang berbunyi sebagai berikut:<sup>14</sup>

### *SERUAN KEPADA SELURUH LAPISAN MASYARAKAT*

#### *Maklumat*

*Dengan lahirnya proklamasi Negara Islam Indonesia Aceh dan daerah sekitarnya, maka lenyaplah kekuasaan Pemerintah Pancasila di Aceh dan daerah sekitarnya, digantikan oleh Pemerintah Negara Islam.*

*Dari itu dipermaklumkan kepada seluruh rakyat, bangsa asing, pemeluk bermacam-macam agama, pegawai negeri, saudagar dan sebagainya:*

- 1. Jangan menghalangi gerakan Tentara Islam Indonesia, tetapi hendaklah memberi bantuan dan bekerja sama untuk menegakkan keamanan dan kesejahteraan Negara.*
- 2. Pegawai-pegawai negeri hendaklah bekerja terus seperti biasa. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh supaya roda pemerintahan terus berjalan lancar.*
- 3. Para saudagar hendaklah terus membuka toko, laksanakan pekerjaan itu seperti biasa, Pemerintahan Islam menjamin keamanan tuan-tuan.*
- 4. Rakyat seluruhnya jangan mengadakan sabotage, merusakkan harta vital, menculik, merampok menyebarkan kabar bohong, infiltrasi, provokasi dan sebagainya yang mengganggu keselamatan umum. Siapa saja yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut, akan dihukum dengan hukuman militer.*
- 5. Kepada tuan-tuan bangsa asing hendaklah tenang dan tenteram, laksanakanlah kewajiban tuan-tuan seperti biasa. Keamanan dan keselamatan tuan-tuan dijamin.*
- 6. Kepada tuan-tuan yang beragama selain Islam jangan ragu-ragu dan sjak wasangka, yakinlah bahwa pemerintahan NII menjamin keselamatan tuan-tuan dan agama yang tuan-tuan peluk, karena Islam memerintahkan untuk melindungi tiap-tiap umat dan agamanya seperti melindungi umat Islam sendiri.*

*Akhirnya kami serukan kepada seluruh lapisan masyarakat agar tentaram dan tenang serta laksanakanlah kewajiban masing-masing seperti biasa.*

#### *Negara Islam Indonesia*

*Gubernur Sipil & Militer Aceh dan daerah sekitarnya.*

Muharram 1373 H

*September 1953*

Maka sejak saat meletusnya pertempuran-pertempuran pertama hingga hari-hari sesudahnya, terjadilah suasana yang sangat keruh di daerah Aceh. Kepanikan terjadi dimana-mana dan di setiap lapangan. Ada yang menguasai dengan tergepoh-gepoh tempat-tempat yang disangka sedikit aman ataupun kedaerahan Sumatra Timur, terutama ke Medan, ada pula yang mengalami gugupan tak tahu apa yang hendak dilakukan dalam

---

<sup>14</sup> M. Nur El Ibrahimy, *Peranan Tgk. M. Daud ...*, hal. 2

ikhtiar menyelamatkan jiwa dari ancaman maut, sedang proses penghidupan sehari-harian penduduk langsung menghadapi akibatnya. Pekerjaan-pekerjaan pertanian, perdagangan, dan kepegawaian terhambat. Suasana menjadi lengang daripada kesibukan sehari-hari dan beralih kepada daya upaya untuk melindungi diri dan jiwa masing-masing.<sup>15</sup>

Dikalangan lain yang menyertai langsung pemberontakan ini terdapat pula kegiatan-kegiatan yang serupa, tetapi coraknya adalah tertuju kepada kesibukan-kesibukan dalam tugas mereka masing-masing yang telah diatur lebih dulu ataupun mendapat intruksi yang tiba-tiba. Sedangkan di pihak pemerintah dengan alat-alat kekuasaannya terjadi pula berbagai kesibukan untuk mengendalikan suasana masyarakat dan mengatasi serangan-serangan yang dihadapinya. Kegiatan kalangan pemberontak tidak hanya ditujukan kepada tindakan-tindakan kemiliteran saja, tetapi juga dengan berbagai cara menyiarkan berbagai peneranannya kepada penduduk Aceh khususnya dan kepada masyarakat di luar daerah Aceh umumnya. Diberbagai tempat yang ketika itu langsung berada dibawah kekuasaan mereka dikibarkan pula bendera-bendera Negara Islam Indonesia.<sup>16</sup>

#### **4. Negosiasi Politik DI/TII Aceh dan Pemerintahan Indonesia**

Pada permulaan bulan September 1954 genap setahun sesudah pecahnya Peristiwa Daud Bereu-eh, seperti halilintar ditengah hari masyarakat Indonesia di Ibu Kota RI termasuk kabinet Ali Sastroamidjojo dikejutkan oleh isu akan dibawanya kasus ini ke dalam forum PBB oleh seorang putra Aceh yang berada di kota New York, Amerika Serikat yaitu Hasan Muhammad Tiro.

Dimana Hasan Tiro menulis surat terbuka kepada Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo, dalam surat itu Hasan Tiro menuduh Pemerintah Ali Sastroamidjojo telah menyeret bangsa Indonesia kedalam lembah keruntuhan ekonomi dan politik, perpecahan dan perang saudara, serta memaksa mereka bunuh-membunuh sesama saudara.<sup>17</sup>

Reaksi pertama pemerintah pusat setelah meletusnya pemberontakan di Aceh ialah berupa kesibukan dengan mengadakan pertemuan-pertemuan yang khusus membicarakan soal tersebut. Seterusnya menjadi kunjungan silih berganti dari para menteri dan pembesar lainnya ke Sumatera Utara. Dalam pertemuan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dengan wakil Perdana Menteri Zainul Arifin, kepala staf Angkatan Darat dan Jaksa Agung dua hari setelah timbulnya pemberontakan itu, telah dibicarakan sedalam-dalamnya peristiwa tersebut, yang kesimpulannya adalah merupakan sikap pemerintah untuk mengambil tindakan yang tegas. Tanggal 20 September, suatu pertemuan yang serupa maksudnya telah diadakan lagi antara Wakil Perdana Menteri Zainul Arifin, Menteri Pertahanan, Jaksa Agung, serta pd. Kepala Staf Angkatan Darat dan kepala Kepolisian Negara. Sepanjang keterangan Perdana Menteri, bahwa tidak berarti S.O.B. sudah berlaku di Aceh sungguhpun sudah dikerahkan kesatuan-kesatuan tentara. Suatu sidang kabinet istimewa telah diadakan pada 24 September untuk mendengarkan laporan Wakil Perdana Menteri Wongsonegoro tentang situasi Aceh.

Harapan pemerintah pusat bahwa dengan langkah-langkah semacam itu ia secara gradual bisa mengendalikan pemerintah di Aceh kepada posisi normal tidak menjadi kenyataan. Masyarakat Aceh bergolak dan tetap menuntut dikembalinya status provinsi. Pada 21 September 1953, pecah pemberontakan DI/TII yang dipimpin Beureu-eh dan

---

<sup>15</sup> Ali Basyah Talsya, *Sejarah dan Dokumen-dokumen Pemberontakan di Aceh*, (Jakarta: Kusuma, n.d) hal. 66

<sup>16</sup> Ali Basyah Talsya, *Sejarah dan Dokumen-dokumen...*, hal 66

<sup>17</sup>M. Nur El Ibrahimy, *Teungku Muhammad Daud Beureueh*, (Jakarta : PT Gunung Agung, 1986), hal. 13



melibatkan banyak rakyat Aceh. ini merupakan pemberontakan pertama pasca-kemerdekaan yang merefleksikan kekecewaan rakyat Aceh. Pemerintah pusat menyadari kekeliruan dan melalui UU no. 24/1956 membentuk provinsi Swasta Aceh- Daerah Swasta Tingkat 1 Aceh. Dua tahun kemudian (1958), *Ikrar Lamteh* mengakhiri pemberontakan Aceh. tetapi, kelompok garis keras dalam tubuh DI/TII, yang dipimpin Beureueh, memandang bahwa Aceh mengingat sejarah dan jasa-jasa kepada RI- haruslah menjadi provinsi yang diberi otonomi yang luas yang memungkinkan pemberlakuan syariat Islam.<sup>18</sup>

## 5. Resolusi Konflik Gerakan DI/TII di Aceh

Untuk menyelesaikan pemberontakan DI/TII di Aceh pemerintah membentuk suatu misi pemerintah pusat yang di pimpin oleh Waperdam I Hardi SH, yang bertugas meristis suatu perundingan dengan pihak pemberontak.

Sebagai hasil dari kesepakatan kedua belah pihak keluarlah keputusan Wakil Perdana Menteri RI No. 1/Misi/1959 tanggal 31 Mei 1959 yaitu tentang pembentukan Daerah istimewa Aceh berdasarkan UU No. 1 Tahun 1957 yang menganut prinsip otonomi yang seluas-luasnya terutama dalam lapangan agama, adat, dan pendidikan.

Konflik yang berlangsung dari tahun 1953 berakhir di tahun 1959 yang diselesaikan melalui perundingan-perundingan baik dipihak RI maupu di DI/TII. Pemerintah pusat menyadari kekeliruan yang dilakukan. Status Aceh menjadi Provinsi Daerah Istimewa Aceh.DI/TII beserta kaum ulama dan pendukungnya kembali kepangkuan RI.

Untuk mengantisipasi konflik yang berkepanjangan dan bertambah banyak jatuh korban, terutama di pihak rakyat sipil Aceh, serta ditambah DI/TII sulit dibasmi secara militer karena mendapat simpatisan luas dalam masyarakat Aceh, maka pemerintah pusat terpaksa mencari pendekatan dan strategi alternatif lain. Alternatif dimaksud, pertama, pemerintah pusat dengan mengangkat perwira asal Aceh sendiri sebagai pimpinan militer tertinggi di Aceh, yaitu seperti Syamaun Gaharu dan T. Hamzah. Melalui perwira inilah gagasan-gagasan pemerintah pusat dapat tersosialisasi, sehingga dapat melahirkan satu kesepakatan yang disebut *Ikrar Lam Teh*,<sup>19</sup>

Berikut ini rancangan rumusan Ikrar Lam Teh :<sup>20</sup>

*BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM*

*KAMI PUTERA-PUTERA ACEH, DI PIHAK MANA PUN KAMI BERADA, AKAN BERJUANG SUNGGUH-SUNGGUH UNTUK :*

- 1. MENJUNJUNG TINGGI KEHORMATAN AGAMA ISLAM*
- 2. MENJUNJUNG TINGGI KEHORMATAN DAN KEPENTINGAN RAKYAT ACEH*
- 3. MENJUNJUNG TINGGI KEHORRMATAN DAN KEPENTINGAN DAERAH ACEH*

---

<sup>18</sup>C. Van Dijk, *Darul Islam: Sebuah Pemberontakan*, (Jakarta: Grafiti, 1983), hal. 255

<sup>19</sup> Nazaruddin Sjamsuddin, *Pemberontakan Kaum Republik: Kasus Darul Islam Aceh*, (Jakarta:PT. Pustaka Utama Grafiti, 1990), hal. 275

<sup>20</sup>Hasan Saleh, *Mengapa Aceh Begolak*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1992), hal. 309-310

Setelah terjadi perundingan dan menghasilkan ikrar lam teh muncullah M. Isa yang mengusulkan sebuah usulan yang positif dimana M. Isa meminta untuk mengumumkan perhentian permusuhan agar terbuka jalan bagi anak buah mereka untuk bersikap dan bergaul seperti mereka lakukan pada malam itu.<sup>21</sup>

Pada tanggal 8 April 1957 serta melakukan kongres rakyat Aceh. pendekatan sekaligus strategi kedua, yaitu dengan memberikan kepada Aceh sebagai Daerah otonomi luas, khususnya dalam bidang keagamaan, pendidikan, dan adat istiadat; serta Aceh diwujutkan kembali sebagai satu provinsi berdiri sendiri, yang terpisah dari provinsi Sumatra Utara.

Selain itu, Soekarno berhadapan dengan pemberontakan DI/TII dan PRRI/permesta yang tidak puas dengan pembangunan daerah. Mereka menilai pemerintah sama sekali tidak profesional dan mengabaikan aspirasi daerah terutama dari luar Jawa. Tekanan demi tekanan yang dialami Soekarno membuat dia bersikap lunak pada Aceh. Pada 1959 Pemerintah Pusat melalui Dekrit No. 1/Missi/1959 memberikan status Aceh sebagai Daerah Istimewa dengan otonomi di bidang agama, pendidikan dan budaya.

Pada Mei 1959, Wakil Perdana Menteri RI, Mr. Hardi, memimpin misi pemerintah ke Aceh untuk meresmikan pemulihan keamanan dan menyambut kembalinya para republikan yang selama 6 tahun membangkang kepada RI. Dengan perundingan yang alot, Komisi Hardi dapat menerima usulan penetapan Aceh sebagai daerah istimewa dan kemudian mengejawantahkannya dalam Keputusan Perdana Menteri RI no. 1/Missi/1959, tertanggal 26 Mei 1959.<sup>22</sup> Keputusan ini memberikan status istimewa kepada Aceh dalam artian dapat melaksanakan otonomi daerah yang seluas-luasnya terutama dalam bidang agama, pendidikan dan peradatan.<sup>23</sup>

Keputusan Pemerintah RI di atas tidak berhasil memuaskan-legalkan kelompok radikal kaum republikan dalam DI/TII. Beureu-eh, pemimpin kelompok radikal, memandang bahwa sebutan istimewa bagi Aceh itu belum memiliki substansi dan bentuk konkret apapun. Karena itu, ia kembali masuk hutan bersama pengikutnya dan melakukan perang gerilnya. Perang saudara antara DI/TII dan TNI kembali bergolak di Aceh. Melalui Pangdam Aceh yang baru, M. Jasin, serangkaian upaya dilakukan untuk memadamkan pembangkangan tersebut dengan jalan damai. Upaya Jasin berjalan lambat, tetapi tidak sia-sia. Pemimpin para pembangkang, Beureu-eh, akhirnya bersedia “turun gunung” dengan syarat pemberlakuan unsur-unsur syariat Islam bagi masyarakat Aceh. Pada 1960, Beureu-eh turun gunung disambut dengan pengumuman Konsepsi Pelaksanaan Unsur-unsur Syariat Islam bagi Daerah Istimewa Aceh.

Daud Beureu-eh akhirnya turun gunung pada 9 Mei 1962 beserta pasukan setianya yang di pimpin oleh Teungku Ilyas Leube. Pemerintah Indonesia menyediakan satu rumah di Banda Aceh, satu mobil yang semua ditolak oleh dia yang memilih kembali ke kampungnya di Sigli untuk bertani.

## **6. Partisipasi Ulama dalam Gerakan DI/TII di Aceh**

Ulama adalah satu kata yang diderivasi secara etimologis dari bahasa Arab, yaitu *al-‘ulama’* bentuk jamak dari kata *‘alimun*, yang bermakna mengetahui atau orang yang mempunyai pengetahuan secara mendalam. Jadi secara semantik ulama berarti orang-

---

<sup>21</sup>Hasan Saleh, *Mengapa Aceh...*, hal. 310

<sup>22</sup>Misi ini dituturkan sendiri oleh Hardi dalam karyanya, *Aceh*, hal.149.

<sup>23</sup> Kaoy, Lukman Hakiem, *Keistimewaan Aceh dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: Pengurus Besar al-Jamiyatul Washiliyah, 2002), hal. 4

orang yang memiliki ilmu pengetahuan luas tentang agama. Thahir Ibn 'Asyur<sup>24</sup> memahami ulama adalah orang-orang mengetahui tentang Allah dan Syari'at-Nya.

Sejak islam pertama kali sampai ke Aceh ulama telah memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan rakyat Aceh. Dalam hal ini, sejumlah ahli memandang bahwa faktor jaringan ulama dari Haramanya telah memberikan warna intelektual di Aceh. Kehadiran mereka saat itu juga sangat diharapkan oleh masyarakat guna mengajar mereka ajara-ajaran Islam. Di samping itu para ulama menjadi penasihat para raja. Dengan begitu, segala keputusan mereka akhirnya menjadi kebijakan kerajaan dalam bidang agama.<sup>25</sup>

Pengakuan terhadap eksistensi ulama dikalangan umat Islam merupakan suatu keharusan. Di Aceh ulama sangat dihormati dan dihargai oleh masyarakat sepanjang sejarahnya. Nasehat dan semangat yang dikobarkan ulama mempunyai makna filosofis yang dapat mempengaruhi jiwa masyarakat, maka tidak heran kalau di Aceh ulama tidak hanya berfungsi sebagai guru dan pengajar, tapi ulama juga dapat menggerakkan masa untuk berperang melawan kolonialisme.

Dalam gerakan DI/TII yang terjadi pada tanggal 21 September 1953 yang di mulai dari kaki tangan Tgk. Muhammad Daud Bereu-eh berjalan dengan lancar sampai ke pelosok kota bahkan ke pelosok kecamatan. Selama dua minggu pertama pemberontakan berbagai kota kecil dan kota besar diserang, termasuk Banda Aceh. Rencana menyerang kota yang belakangan ini baru diketahui polisi sehari sebelum malam pemberontakan dimulai yaitu 19 September. Di pantai timur serangan di pusatkan pada kota-kota yang tepatnya pada jalan kereta api dari Banda Aceh, lewat Seulimueum di Aceh Besar, Sigli dan Meureudu di Pidie, Bireuen dan Lkhokseumawe di Aceh Utara, dan Idi, Peureulak dan Langsa di Aceh Timur, ke Medan.<sup>26</sup>

Pos polisi kecil yang berada di Peureulak yang anggotanya kira-kira sepuluh petugas termasuk yang pertama di serang. Pos polisi maupun kota Peureulak diduduki pasukan pemberontak yang di pimpin Ghazali Idris tanpa satu perlawanan pun dalam waktu dua jam. Bahkan pada tempat-tempat yang strategis di adakan penjagaan dan bendera *Darul Islam* pun di kibarkan dari gedung-gedung penting di kota itu.<sup>27</sup>

Pengakuan A. H. Geulanggang (pseudonim mantan bupati Pidie, T. A. Hasan) dalam bukunya (5 Mei 1956) pemberontakan Darul Islam sudah tersusun rapi di Aceh tanpa mendapat hambatan dari aparat keamanan. Hal ini dimungkinkan karena sebagian

---

<sup>24</sup> Muhammad Thahir bin Asyur salah seorang intelektual Muslim kelahiran Tunisia yang sangat disegani dan dihormati. Ia lahir pada tahun 1879 dan wafat tahun 1973. Pada zamannya, Asyur dikenal sebagai seorang ulama yang progresif dalam bidang hukum Islam, terutama yang terkait dengan ilmu Maqashid asy-Syariah. Berkat pengembangannya terhadap ilmu tersebut, ia dianggap sebagai ulama penerus ide Imam Syathibi yang nota benenya adalah Bapak Maqashid asy-Syariah. (diakses pada tanggal 27 April 2013, pdf oleh Muhammad Thahir bin al-Asyur & Maqashid Syariah, Rabu, 24 September 2008).

<sup>25</sup>M. hasbi Amiruddin, *Ulama Dayah Pengawal Agama Masyarakat Aceh*, (Lhokseumawe : Yayasan Nadiya, cet. 2, 2007), hal. 1

<sup>26</sup>C. Van Djik, *Darul Islam Sebuah Pemberontakan*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, cet. 3, 1993), hal. 289

<sup>27</sup>*Darul Islam Aceh* Mempunyai empat bendera, sebuah bendera merah dengan bintang dan bulan sabit putih, sebuah bendera hijau dengan bintang dan bulan sabit putih, sebuah bendera merah dengan bulan sabit putih dan empat bintang, dan sebuah bendera putih dan merah dengan bulan sabit pada jalur merah dan bintang di jalur putih.

besar pamong praja di Aceh waktu itu, menurut M. Sahim Hasyimi Bupati Aceh Barat 1952-1953, mempunyai hubungan baik dengan pemimpin pemberontakan.<sup>28</sup>

Untuk menggerakkan pemberontakan ini Tgk. Muhammad Daud Bereu-eh dan kawan-kawannya terlebih dahulu telah menyusun skenario rancangan pemberontakan, namun karena lengah dan kurang informasi maka pemberontakan tidak sesuai dengan skenario dimana di wilayah Idi dan Perelak para penuntut otonomi telah mendahului gerakan mereka satu hari dari rencana.<sup>29</sup>

Walaupun demikian pemberontakan tetap berlanjut, Letnan Ibrahim Saleh bersama dengan 50 orang kesatuan kompi bergerak memasuki Aceh melalui pedalaman Kutacane, Blang Krijen dan Takengon. Pemberontakan yang telah memulai riwayatnya itu pun menjalar pula ke daerah-daerah lain. Di Aceh Utara gerombolan yang berada dibawah tokoh-tokoh seperti Husen Yusuf, H. Abu Bakar Bireuen, H. Affan, Tgk. Syeh A. Hamid dan H. Ibrahim berhasil menaklukkan Lhok Sukon dan ibu kota kecamatan, sedangkan kota Bireuen dan Lhokseumawe tetap berada dibawah kekuasaan tentara dan polisi walaupun mereka berkali-kali mencoba lakukan serangan.<sup>30</sup>

Di Aceh Besar pasukan gerombolan yang berada dibawah pimpinan tokoh-tokoh setempat seperti Ishak Amin, A. Gani Usman, A. Wahab Ibrahim, dan Tgk. H. A. Hasballah Indra Puri juga hanya berhasil merebut kota-kota kecamatan yang terdapat sekitar Kuta Raja yang antara lain Selimum, Indra Puri, dan Lhoknga. Walaupun Sulaiman Daud, pemangku residen tidak bergabung pemberontak, Mayor Priatna, komanda Resimen I, yang bekerja sama dengan kordinator polisi Nyak Umar dan Bupati Aceh Besar A. Wahab mampu mengendalikan keadaan dari ancaman gerombolan.<sup>31</sup>

Di Aceh Barat pemberontakan dipimpin oleh tokoh-tokoh setempat yang antara lain terdiri dari Tgk. Hasan Hanafiah, Kepala Jawatan Agama, T. R. Idris, pegawai agama, dan Tgk. Zakariya Yunus. Di daerah ini gerombolan juga berhasil menduduki beberapa ibukota kecamatan. Kota Meulaboh berhasil dipertahankan oleh aparat keamanan dari serangan gerombolan berkat kordinasi Patih R. Kadilong.

Hanya Takengonlah satu-satunya ibukota kabupaten yang berhasil direbut melalui pertempuran oleh gerombolan yang dipimpin oleh Ilyas Lube dan M. Saleh Adri. Aparat pemerintah yang setia terpaksa mengungsi ke kota Bireuen, sementara bupatinya M. Husin yang juga turut berpihak kepada gerombolan berhasil ditangkap.

Di Aceh Selatan gerombolan berada di bawah pimpinan Tgk. Zamzami Yahya, Kepala Jawatan Agama dan M. Saleh Kapa, alumnus Perguruan Normal Bireuen yang waktu itu pegawai kantor Bupati. Walaupun gerombolan dapat memasuki kota Tapaktuan, mereka tidak berhasil mengambil alih kekuasaan, sebab sekretaris kabupaten, J. A. M. Hutabarat dan PDM (Perwira Distrik Militer) Letnan Hasan Samosir mengungsikan pemerintah ke Kandang Bakongan 40 km di Selatan Tapaktuan.

Bila diperhatikan melalui serangan-serangan yang mereka lancarkan sejak tanggal 19 September 1953, jumlah kekuatan gerombolan ada sekitar 10.000 orang dengan jumlah senjata api berkisar 800-1000 pucuk. Pasukan inti gerombolan berasal dari Pandu Islam yang sebelum pemberontakan meletus berjumlah kurang lebih 4000 orang. Tenaga

---

<sup>28</sup>M. Isa Sulaiman, *Sejarah Aceh Sebuah Gugatan Terhadap Tradisi*, (Jakarta :Pustaka Sinar Harapan, 1997), hal. 286

<sup>29</sup>M. Isa Sulaiman, *Sejarah Aceh Sebuah ...*, hal. 287

<sup>30</sup>M. Isa Sulaiman, *Sejarah Aceh Sebuah ...*, hal. 289-290

<sup>31</sup>M. Isa Sulaiman, *Sejarah Aceh Sebuah ...*, hal. 291

tersebut diperkuat oleh 98 orang militer disersi dari Sedikalang dan sekitar 400 lain yang berasal dari polisi termasuk pengawal penjara dan esk tentara yang tergabung dalam Biro Pejuang Aceh. Unsur lain berasal dari kelompok yang tidak puas terutama pamong praja, Jawatan Agama, termasuk Mahkamah Syariah, Sekolah Agama, dan Pelajar Sekolah Agama.

## **7. Ulama yang Tidak Mendukung Gerakan DI/TII di Aceh**

Pada tanggal 13 Muharram 1373 /21 september 1953 meletuslah peristiwa berdarah di Aceh yaitu peristiwa DI/TII yang dipimpin oleh Tgk. Muhammad Daud Bereueh, mantan Gubernur Militer Aceh Langkat dan Tanah Karo dan mantan Gubernur Aceh dan merupakan salah seorang pemimpin utama PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh).

Dalam hal ini para ulama besar di Aceh yang terdiri dari Kaum Tua antara lain Syech Muda Waly, Syech Hasan Krueng Kalee, Teungku Abdul Salam Meuraksa, Teungku Saleh Mesigit Raya dan ulama lainnya tidak mendukung gerakan ini, karena mereka mengetahui bahwa latar belakang kejadian ini bukanlah hal-hal yang dikaitkan dengan agama tetapi hanyalah hal-hal yang dikaitkan dengan dunia semata.<sup>32</sup>

Oleh karena itu para ulama tersebut mengeluarkan fatwa mengutuk pemberontakan tersebut atas nama para ulama-ulama tersebut. Akan tetapi karena semua ulama tersebut berada dalam PERTI maka penonjolannya lebih terlihat atas nama PERTI. Teungku Syech Muda Waly pada tanggal 18 November 1959 dalam suatu rapat umum di Labuhan Haji mengharamkan pemberontakan tersebut, dan beliau menyatakan siap memberi bantuan menurut kesanggupan beliau. Para ulama-ulama tersebut sangat menyayangkan kenapa faktor-faktor pemberontakan tersebut tidak dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan para ulama-ulama besar di Aceh. Sehingga segala permasalahan dapat diselesaikan tanpa harus melalui peristiwa berdarah.

Para penuntut otonomi yang merasa ragu akan keberhasilan pemberontakan bersenjata kelihatannya menempuh cara-cara sendiri untuk menghindari keterlibatan langsung dalam proyek tersebut. Sebagian dari mereka seperti Tgk. A. Wahab Seulimum dan Tgk. Syeh Daud Tangse telah pergi melaksanakan ibadah haji ke Mekkah. Sebagian lain seperti Mayor Hasballah Haji, Tgk. Syech Marhaban, dan Ali Hasymi membatalkan niat mereka, sedangkan Amelz dan juga M. Nur El Ibrahimy menolak secara halus untuk turut serta.

Salah satu target pelampiasan mereka adalah lawan-lawan politik tradisional mereka yaitu kaum bangsawan dan pengikutnya yang secara formal berafiliasi kedalam organisasi BKR, PI, Perti, PNI, dan PKI. Menurut laporan komisi parlemen ratusan bangsawan dan pengikutnya yang ditanggkap oleh gerombolan untuk di eksekusi, demikian pula di Meureudu. Daftar nama-nama orang yang mau di culik telah disusun terlebih dulu sebagai mana dokumen yang diperoleh tentara di rumah A. Gani Mutiara. Keadaan serupa juga terjadi di daerah-daerah lain terutama di daerah-daerah yang berhasil di kuasai oleh pemberontak.<sup>33</sup>

Lawan politik yang tidak berada di tempat saat terjadi pemberontakan mereka selamat karena mereka terlebih dahulu mengungsi ke kota sebagaimana yang dilakukan oleh T. A. Rahman Muli, T. Ali Basyah Trenggadeng, T. Harun, dan T. M. Ali Panglima Polem. Hal serupa juga dilakukan oleh ulama yang telah bergabung BKR atau PI Perti seperti yang dilakukan oleh Tgk. H. Hasan Krung Kale dan Tgk. A. Salam Meraksa.

---

<sup>32</sup><http://budigayanto.blogspot.com/2013/04/kumpulan-biografu-dan-kisah-ulama-aceh.html>

<sup>33</sup>M. Isa Sulaiman, *Sejarah Aceh Sebuah ...*, hal.293

Pendek kata ratusan keluarga bangsawan atau ulama tradisional beserta pengikutnya yang tidak bergabung ke dalam kelompok pemberontakan terpaksa mengungsi ke kota-kota untuk menghindari penculikan.

Namun dalam melancarkan serangan ada juga wilayah yang tidak bisa di taklukkan oleh kaum pemberontak baik itu ibukota keresidenan maupun kabupaten. Kegagalan ini mengakibatkan buyarnya skenario perang yang telah mereka susun. Area yang tidak bisa di taklukkan oleh kaum pemberontak ini segera berubah fungsinya menjadi basis pertahanan republik untuk merebut kembali daerah-daerah yang telah di kuasai oleh pemberontak.

Semua unsur pemerintah yang tidak bergabung dalam gerakan yang terjadi pada tanggal 21 September 1953 ini membentuk sebuah badan kolegal yang bernama Staf Keamanan Sipil, karena pemangku residen Sulaiman Daud telah membelot kepada pihak pemberontak. Ketua Staf Keamanan Sipil kemudian dipegang oleh Bupati Aceh Besar A. Wahab yang merupakan seorang aktifis PNI yang berasal dari Gayo.<sup>34</sup>

Kemudian dari pada itu, tentara-tentara yang dikirim oleh pusat bekerja sama dengan unsur yang setia kepada republik di lokasi yang bersangkutan yang terdiri dari kelompok pendatang, kaum bangsawan, dan ulama tradisional atau pimpinan tarekat untuk melakukan serangan balik terhadap gerombolan yang telah menguasai daerah luar kota. Seperti halnya yang terjadi di Kuta Raja dimana figur seperti T. M. Ali Panglima Polem dan Tgk. Hasan Krung Kale cukup aktif membantu pemerintah, karena menurut mereka tindakan mendirikan negara dalam negara oleh gerombolan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan juga agama.

Dalam menanggapi pemikiran yang mengatakan bahwa proklamasi Negara Islam akan menimbulkan kekacauan dan bertentangan dengan hukum, Daud Bereueh menegaskan, sebaliknya kekacauan hukum yang berlakulah yang menyebabkan jihad suci menegakkan Negara Islam. Ia menasehati para pemimpin Republik agar tidak menggunakan kekerasan, tetapi menanggulangi inti pokok persoalan dan memperbaiki dasar-dasar negara mereka, juga kebijakan mereka.<sup>35</sup>

Di daerah Pidie juga terjadi hal yang serupa dimana aparat keamanan juga bekerja sama dengan lawan politik pemberontak daerah tersebut. Pada hari senin 22 September 1953, T. Harun di temani oleh T. A. Hamid dan Pocut Hamidah ikut membantu mobring dalam melakukan operasi disekitar Sigli.<sup>36</sup> Demikian juga figur-figur bangsawan lain dan ulama tradisional setempat seperti Tgk. M. Saleh Iboih.

Pandangan serupa juga terjadi di daerah-daerah lain. Di Aceh Barat misalnya menurut R. Kadelong, Patih Aceh Barat, alat keamanan negara di daerah itu memperoleh bantuan dari figur-figur antara lain Habib Muda, pimpinan tarekat, dan menantunya T. R. Azman di Jeuram, T. Usman Yacub, eks Mayor TRI yang waktu itu Wiraswasta dan ketua Pemuda Demokrat. Sedangkan di Aceh Selatan alat keamanan mendapat bantuan dari Nyak Diwan, T. Ramli Angkasah, Tgk. H. M. Wali, dan Tgk. Adnan Mahmud.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup>M. Isa Suliaiman, *Sejarah Aceh Sebuah Gugatan Terhadap Tradisi*, (Jakarta :Pustaka Sinar Harapan, 1997), hal. 294-295

<sup>35</sup>Galanggang, *Rahasia Pemberontakan Atjeh dan Kegagalan Politik Mr. S. M. Amin*, (Banda Aceh : Pustaka Murni Hati, 1956), hal. 45-51

<sup>36</sup>T. Harun, *Sebuah Sisi Lain Tentang Kehidupan Tgk. M. Daud Bereueh*, 31 Agustus 1953 (naskah ketikan), hal. 19-20

<sup>37</sup>M. Isa Suliaiman, *Sejarah Aceh Sebuah...*, hal. 296

Berkat bantuan dari unsur yang setia kepada Republik alat keamanan negara segera merebut satu persatu daerah-daerah pedalaman yaitu ibukota kecamatan, kewedanaan dan kota Takengon yang telah berada dalam pengaman pemberontak. Kesatuan militer Kutaraja berhasil memasuki Seulimum, sehingga pemberontak kocar-kacir kepedalaman. Tanggal 25 September kesatuan militer dari pantai timur telah berhasil memasuki Idi. Tanggal 9 Oktober kesatuan militer dibawah komandan Ibrahim Ajie berhasil memasuki Blang Kejeren kemudian sehari kemudian kesatuan militer yang didaratkan di pantai Barat berhasil memasuki Calang. Singkat kata pada pertengahan Oktober 1953 kekuatan utama pemberontakan hanya berada di daerah Mereudu, Takengon, Tangse dan Lameulo.<sup>38</sup>

Kemudian pada tanggal 23 Oktober pertahanan gerombolan yang berada di Garot dan Lameulo terpaksa dipindahkan ke Gle Meulinteung bukit alami yang membatasi Kemala dengan Tangse dikarenakan Meureudu, Garot dan Lameulo digempur habis-habisan oleh kesatuan Militer Republik.

Militer Republik terus mengempur tempat-tempat yang gerombolan duduki mulai dari Takengon yang masuknya mulai Bireuen Blang Kejeren melalui Isaq dengan tujuan yang sama. Gerombolan yang berada dibawah komando Ilyas Leube dan Saleh Adri tidak mampu menghadapi serangan militer itu sehingga mereka meninggalkan kota tersebut pada tanggal 23 November 1953.

Begitu juga dengan halnya markas besar pemberontakan yang berada di Tangse juga ikut di serang oleh Militer Republik, sehingga Tgk. M. Daud Bereu-eh beserta staf intinya terpaksa hijrah ke Geumpang kurang lebih 8 km kepedalaman Tangse. Namun enam hari kemudian Geumpang juga dapat direbut oleh kesatuan militer pemerintah. Dengan demikian tiada satupun ibu kota kewedanaan dan kecamatan yang masih berada ditangan gerombolan lagi. Sejak saat itu Tgk. M. Daud Bereu-eh beserta staf intinya terpaksa berkelana dari satu tempat persembunyian ketempat persembunyian lain di hutan belantara Aceh.<sup>39</sup>

## **8. Kontribusi Rakyat Aceh Terhadap Gerakan DI/TII di Aceh**

Sejak dimulainya penjajahan Indonesia oleh Belanda rakyat Aceh dan ulama sudah mulai terlibat didalamnya untuk mempertahankan Indonesia. Tanpa menghakimi siapa yang salah, bisa dikatakan bahwa pemberontakan yang terjadi pada tanggal 21 September 1953 melibatkan mayoritas rakyat Aceh karena dipimpin oleh sejumlah ulama yang sangat dihormati.<sup>40</sup>

Salah satu gejala yang menyelok dari pemberontakan DI/TII adalah keuletannya. Dalam hal ini terdapat perbedaan yang besar sekali antara pemberontakan PRRI/Permesta yang mana ketika Angkatan Darat Republik Indonesia Pusat bertindak menghadapinya cepat sekali melempem, begitu juga dengan perang PKI sesudah 1965 yang di tumpas oleh Angkatan Darat hanya dalam beberapa bulan, ini di karenakan oleh

---

<sup>38</sup>M. Isa Suliaiman, *Sejarah Aceh Sebuah...*, hal. 297

<sup>39</sup>Lihat *Mestika*, 30 November 1953, *Mimbar Umum 2 Desember 1953* dan Hasan Saleh, *loc, cit*

<sup>40</sup>M. Hasbi Amiruddin cet. 2, *Ulama Dayah Pengawal Agama Masyarakat Aceh*, (Lhokseumawe : Yayasan Nadia, 2007), hal. 39

masyarakat/rakyat setempat yang tidak memberi dukungan kepada kedua pemberontakan ini.<sup>41</sup>

Dari lukisan terdahulu kita dapat melihat, setidaknya ada dua faktor yang saling berhubungan yang menyebabkan rakyat Aceh ikut dalam gerakan DI/TII Aceh. Yaitu, *pertama*, kebencian akan bertambahnya pengaruh tentara Republik dan kaitannya dengan politik dimobilisasi Pemerintah Republik. *Kedua*, bertambahnya pengawasan pemerintah Republik atas provinsi-provinsi, disamping perasaan yang tidak senang antara Pemerintah Pusat dan rakyat daerah dengan kepentingan ekonomi masing-masing.<sup>42</sup>

Pemerintah Pusat lebih memilih kepentingan pribadi daripada rakyat dimana daerah-daerah yang berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda dan Jepang tidak diperdulikan begitu juga dengan masyarakat-masyarakatnya. Dimana dalam struktur kenegaraan lebih diutamakan orang yang berasal dari daerah yang tidak termasuk dalam mempertahankan kemerdekaan untuk dijadikan pegawai negara yang baru.

Akibat dari semua ini pertama sekali terasa di Kalimantan Selatan, pemerintah sama sekali tidak mempertimbangkan hasil-hasil yang di capai ALRI Devisi IV, yang sebelumnya berjanji menaati struktur federal, dimana Banjar dan Kalimantan Selatan untuk menjadi daerah-daerah otonom malah pemerintah membubarkan devisi ini.

Di Aceh kepentingan yang bertentangan dari perluasan kekuasaan pusat dan perlawanan daerah terhadapnya mengakibatkan pemberontakan bersenjata lagi. Namun keadaan disini sama penggantian para pegawai negeri lokal yang telah terkenal selama revolusi dan dimobilisasi tentara. Tetapi ada satu perbedaan pokok dengan daerah-daerah kacau yang lain. Aceh adalah sebuah daerah Indonesia yang tidak pernah diduduki pasukan Belanda dalam masa revolusi. Karena itu pemimpin-pemimpin yang menggunakan kekuatan dalam waktu itu relative berhasil dibandingkan dengan mereka dari Kalimantan Selatan dan Sulawesi selatan dalam mendapatkan kedudukan militer, sipil, dan ekonomi yang terkemuka bagi dirinya.<sup>43</sup> Selain faktor tersebut juga faktor norma dan nilai yang berubah mengenai pemilikan tanah dan peranan yang dimainkan agama.

Masyarakat juga berkontribusi dalam gerakan ini untuk mengantisipasi kalau-kalau Pemerintah Republik meniadakan hasil-hasil yang dicapai revolusi sosial dan merenggutkan dari orang kedudukan ekonominya yang baru diperolehnya, atau kalau-kalau uleebalang dikembalikan pada kedudukannya semula. Walaupun perubahan-perubahan dalam struktur agraria disini turut menyebabkan pemberontakan DI/TII. Golongan buruh perkebunan dan pertambangan pasti harus turut diperhitungkan, walaupun tidak mendapat data tentang sejauh mana dan sifat sumbangan mereka kepada pasukan Darul Islam. Karena sebagian buruh perkebunan adalah bekas gerilyawan pasti ada sokongan dari golongan ini. Di pihak lain perkebunan-perkebunan sebagian bersandar pada bukan orang Aceh untuk tenaga kerjanya.<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup>C. Van Dijk, *Darul Islam Sebuah Pemberontakan*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafika, cet. 3, 1993), hal. 321

<sup>42</sup>C. Van Dijk, *Darul Islam ...*, hal. 321

<sup>43</sup>C. Van Dijk, *Darul Islam ...*, hal. 323

<sup>44</sup>C. Van Dijk, *Darul Islam ...*, hal. 364-365



### **C. Kesimpulan**

Peristiwa DI/TII muncul di Aceh dikarenakan ketidakpuasan rakyat Aceh kepada pemerintah pusat. Tgk. M. Nur El Ibrahimy yang merupakan salah satu pelaku sejarah mengemukakan bahwa peristiwa yang menjadi problema nasional tersebut terjadi erat kaitannya dengan dan karena kecendrungan pusat (Jakarta) yang munafik dan para petinggi republik telah mengecewakan tokoh-tokoh ulama di Aceh, sehingga menimbulkan pemberontakan dikalangan rakyat Aceh.

Pemberontakan tersebut dikenal dengan nama peristiwa berdarah. Yang menjadi pimpinan gerakan ini adalah Daud Beureu-eh. Pada saat itu, Daud Beureu-eh memukul gong pemberontakan dengan pernyataan Aceh memisahkan diri dari Indonesia. Pernyataan ini terjadi setelah kongres ulama di Titeue Pidie. Daud Beureu-eh mengumumkan Aceh menjadi bagian dari Negara Islam Indonesia mengikuti Kartosoewirjo di Jawa Barat.

Kunci utama yang menyebabkan terjadinya pemberontakan DI/TII di Aceh ialah karena Aceh merasa dikhianati. Persoalan inilah yang menyebabkan kekecewaan dari pihak pemimpin dan rakyat Aceh. Karena Aceh-lah sebagai daerah modal tegaknya NKRI. Aceh telah banyak berjasa atas kemerdekaan negara Indonesia tetapi setelah Indonesia merdeka Aceh merasa dirugikan. Sampai-sampai Aceh digabungkan dengan provinsi Sumatra Utara. Kekecewaan inilah yang menyebabkan lahirnya DI/TII di Aceh.

Tujuan dari gerakan DI/TII adalah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara teokrasi dengan agama Islam sebagai dasar negara. Karena dalam proklamasi disebutkan bahwa hukum yang berlaku dalam Negara Islam Indonesia adalah Hukum Islam, dan dalam undang-undang juga dinyatakan bahwa Negara berdasarkan Islam dan Hukum yang tertinggi adalah Al Quran dan Hadits. Selain itu, Gerakan ini juga bertujuan untuk memprotes kepada pemerintah pusat yang tidak mau mengakui Aceh sebagai sebuah provinsi seperti apa yang di harapkan oleh rakyat Aceh, karena melihat dimana Aceh adalah daerah yang sudah lama terlibat dalam perang untuk mempertahankan Indonesia dari Belanda. Maka dengan alasan tersebut rakyat Aceh meminta pemerintah pusat untuk memperlakukan daerah Aceh dengan istimewa dalam hal budaya, agama, dan pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- C. Van Dijk, *Darul Islam Sebuah Pemberontakan*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1987
- Dyah Rahmany P (ed), *Rumoh Geudong : Tanda Luka Orang Aceh*. Banda Aceh : Cardova, Institute for Civil society Empowerment, 2001
- Hasan Saleh, *Mengapa Aceh Begolak*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1992
- Herbert Feth & Lance Castles (ed), *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, Jakarta: LP3ES, 1995
- Kaoy & Lukman Hakiem, *Keistimewaan Aceh dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: Pengurus Besar al-Jamiyatul Washiliyah, 2002
- M. Hasbi Amiruddin, *Menatap Masa Depan Dayah di Aceh*, Banda Aceh : Yayasan PeNA, 2008
- M. Hasbi Amiruddin, cet. 2, *Ulama Dayah Pengawal Agama Masyarakat Aceh*, Lhokseumawe : Yayasan Nadia, 2007
- Misri A. Muchsin, *Potret Aceh Dalam Bingkai Sejarah*, Banda Aceh : Ar-Raniry Press, 2007
- M. Nur El Ibrahimy, *Tgk. M. Daud Beureueh Peranannya dalam Pergolakan di Aceh*. Jakarta : PT Gunung Agung, 1982
- M. Nur El Ibrahimy, *Teungku Muhammad Daud Beureueh*, Jakarta : PT Gunung Agung, 1986
- Nazaruddin Sjamsuddin, *Pemberontakan Kaum Republik : Kasus Darul Islam Aceh*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1990
- M. Isa Suliaiman, *Sejarah Aceh Sebuah Gugatan Terhadap Tradisi*, (Jakarta :Pustaka Sinar Harapan, 1997)
- Galanggang, *Rahasia Pemberontakan Atjeh dan Kegagalan Politik Mr. S. M. Amin*, (Banda Aceh : Pustaka Murni Hati, 1956)